

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIFITAS
PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SMK RAHMANI
KECAMATAN LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA**

Oleh : Margaretha Badu

Abstrak :Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Efektifitas Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMK Rahmani Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara. dan Untuk mengetahui Faktor- faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Efektifitas Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMK Rahmani Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Rahmani Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data di Analisis secara kualitatif yaitu mendeskripsikan ciri-ciri atau karakteristik variabel-variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dalam penyaluran dana BOS di SMK Rahmani Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara bahwa dari indikator yang telah ditetapkan pada dasarnya pelaksanaan fungsi pengawasan telah menunjukkan hasil yang baik tetapi indikator tentang ketepatan waktu dan tepat sasaran masih menunjukkan hasil yang kurang baik. Faktor yang mempengaruhi terhadap fungsi pengawasan terhadap penyaluran dana BOS di SMK Rahmani Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara antara lain lembaga pengawas, sosialisasi pedoman dan disiplin. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah Untuk memaksimalkan pengawasan hendaknya pengawasan terhadap penyaluran dana BOS dilaksanakan secara kontinyu. Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan ketepatan sasaran dan penggunaan dalam penggunaan dana BOS. Dalam upaya meningkatkan pengawasan dalam penyaluran dana BOS hendaknya koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali Utara

Kata Kunci : *Fungsi Pengawasan*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta

didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak Tahun 2005 telah berperan besar dalam percepatan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta memberikan kontribusi besar untuk peningkatan mutu pendidikan dasar. Selain itu program ini menjadi pilar utama demi mewujudkan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan dasar. yang diikuti dengan

komitmen pemerintah dan pemerintah daerah serta peran serta masyarakat dalam pengawasan program dan pendanaan ini. Agar program ini berjalan lancar dan transparan maka pengawasan berupa monitoring, supervisi dan pelaporan perlu dilakukan secara efektif dan terpadu. Bentuk kegiatan ini adalah melakukan pemantauan pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah. Secara umum kegiatan ini adalah untuk meyakinkan dana yang diterima oleh sekolah, tepat penggunaan, tepat waktu, dan tepat sasaran.

Pada tataran empiris pengamatan sementara dilapangan menunjukkan bahwa dimana

pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap efektifitas penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah di SMK Rahmani Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara belum menunjukkan hasil yang maksimal sehingga masih terdapat sekolah yang melaksanakan program tersebut belum tepat penggunaannya. Kondisi diatas terlihat belum tepat waktu penyaluran dan belum tepat sasaran, problem yang dihadapi adalah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS hanya dengan cara sampel sehingga tidak semua sekolah dapat dilakukan pengawasan selain itu dana pelaksanaan pengawasan juga sangat minim yang mana seharusnya fungsi pengawasan untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan sebaik baiknya. Berangkat dari masalah diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul : ***Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Efektifitas Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMK Rahmani Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara.***

TEORI DAN KONSEP

1. Pengertian Fungsi

Definisi tersebut menggambarkan bahwa fungsi merupakan bagian suatu keterkaitan antara berbagai komponen atau bagian-bagian yang mempunyai tugas yang berbeda-beda satu sama lain dalam suatu sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan The Liang Gie (2009 : 9), mengemukakan "Fungsi adalah sekelompok tugas pekerjaan meliputi aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaanya atau karena mengutamakan urutan/ataupun secara praktis saling tergantung satu sama lain.

Definisi di atas memberikan gambaran bahwa fungsi menunjukan suatu obyek atau pokok yang bersifat dinamis yang menentukan suatu hal atau usaha, hal ini berarti bahwa setiap obyek tertentu harus terlibat dalam suatu fungsi. Definisi fungsi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli dalam bidang administrasi, maka fungsi dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) antara :

- a. Fungsi organik adalah fungsi yang merupakan pembidangan kegiatan dalam suatu organisasi.
- b. Fungsi teknis adalah fungsi-fungsi organik tersebut di atas didasarkan atas keahlian dan kejuruan.
- c. Fungsi utama adalah fungsi dari suatu organisasi yang menjadi pokok dalam menentukan batas-batas ruang lingkup organisasi itu.

2. Pengertian Pengawasan

Pengertian pengawasan yaitu segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan mestinya atau tidak. Adapun maksud dan tujuan pengawasan adalah sebagai berikut :

Maksud Pengawasan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan untuk mencapai tujuan dari pemerintah yang telah

direncanakan maka perlu ada pengawasan karena dengan pengawasan tersebut serta tujuan yang akan dicapai dapat dilihat dengan berpedoman rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah sendiri. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa prinsip pengawasan itu sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintah sehingga pengawasan diadakan dengan maksud untuk :

- a. Mengetahui lancarnya pekerjaan apakah lancar atau tidak.
- b. Mengetahui kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan akan tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbul kesalahan yang baru.
- c. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning yaitu standart

Selain itu Victor M. Situmorang (1993 :23) menyatakan bahwa pengawasan itu adalah :

- a. Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari masyarakat.
- b. Untuk melindungi Hak azasi Manusia yang telah dijamin oleh Undang-Undang dari pada tindakan penyalagunaan kekuasaan.

Selain itu menurut Susilo Martoyo (2008 : 123) menyatakan bahwa “ Pengawasan adalah proses untuk menentukan apa yang harus dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan menilai proses dan hasil pelaksanaan pekerjaan /tugas, melakukan koreksi atas kesalahan agar sesuai rencana dan sebagainya.

3. Pengertian Efektivitas

Dalam membicarakan masalah efektivitas maka tidak lepas dari kegiatan dengan unsure waktu. Waktu merupakan salah satu sumber organisasional yang amat berharga akan tetapi sering kurang disadari oleh anggota organisasi. Pentingnya unsur waktu dalam kehidupan organisasional lebih terlihat lagi jika dikaitkan dengan efektivitas kerja. Secara sederhana dikatakan bahwa efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya yang telah ditetapkan artinya apakah pelaksanaan sesuatu tugas itu diselesaikan dan terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melakukan dengan biaya yang dikeluarkan untuk itu bahkan ada beberapa jenis pekerjaan /kegiatan yang sangat menuntut efektivitas tanpa terlalu memperhitungkan efisiensi. Selanjutnya penulis mengemukakan beberapa pengertian efektivitas. Menurut Suyadi Prawirosentono (2009:28) menyatakan bahwa:

Efektivitas dari usaha kerja (antar individu) berhubungan dengan pelaksanaan yang dapat mencapai tujuan dalam satu sistem dan hal itu ditentukan dengan satu pandangan dapat memenuhi kebutuhan sistim itu sendiri . Sedangkan efisiensi dari suatu kerja sama dalam suatu sistim adalah hasil guna gabungan efisiensi dari upaya yang dipilih masing-masing individu.

4. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Agar pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan masyarakat memahami program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan benar maka berikut ini akan diuraikan definisi tentang Biaya Pendidikan dan terminologi BOS. Biaya Satuan Pendidikan (BSP) adalah besarnya biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa tiap tahun sehingga mampu menunjang proses belajar mengajar sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan cara penggunaannya. Biaya Satuan Pendidikan dibedakan menjadi Biaya Satuan

Pendidikan investasi dan Biaya Satuan Pendidikan Operasional. Biaya Satuan Pendidikan investasi adalah biaya yang dikeluarkan setiap siswa dalam satu tahun untuk pembiayaan sumber daya yang tidak habis pakai dalam waktu lebih dari satu tahun, seperti pengadaan buku, alat peraga, media perabot, dan alat kantor. Sedangkan Biaya Satuan Pendidikan Operasional adalah biaya yang dikeluarkan setiap siswa dalam waktu satu tahun untuk pembiayaan sumber daya pendidikan yang habis pakai dalam satu tahun atau kurang. Biaya personil meliputi biaya kesejahteraan (honor kelebihan jam mengajar (KJM), Guru tidak tetap (GTT),Uang lembur,dan pengembangan Professional guru (Pedidikan dan Pelatihan Guru), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG) dan lain-lain.Biaya non personil adalah biaya untuk menunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), evaluasi /penilaian, perawatan /pemeliharaan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, rumah tangga sekolah dan supervisi.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif

kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran yang detail mengenai obyek yang diteliti yaitu pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap efektifitas penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah di SMK Rahmani Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara.

Sumber data penelitian menggunakan jenis data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui observasi, kuisioner dan wawancara dengan informan yang berjumlah 14 orang dan data sekunder yaitu adalah data yang diperoleh melalui literature dan data-data dari SMK Rahmani Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan kuisioner. Analisis data kualitatif mulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Fungsi pelaksanaan pengawasan terhadap efektifitas penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah di SMK Rahmani Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara dari 3 indikator yaitu :

1. Pengamatan

Tabel 1
Tanggapan responden tentang pengamatan dalam penyaluran Dana BOS

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (F)	Prosentase(%)
1.	Sangat Baik	3	21,4
2.	Baik	10	71,4
3.	Kurang Baik	1	7,2
4.	Tidak Baik	-	-
Jumlah		14	100

Sumber : Hasil Olahan Data Primer Tahun 2015

Hasil penelitian dari hasil tanggapan responden diatas menunjukkan bahwa dari 14 responden yang memberikan tanggapan

sangat baik berjumlah 3 atau 21,4 %. Selanjutnya yang memberikan tanggapan baik terhadap pengamatan dalam penyaluran

dana BOS berjumlah 10 atau 71,4 % dan yang memberikan tanggapan kurang baik 1 atau 7,2 %. Yang memberikan tanggapan tidak baik tidak ada. Secara keseluruhan dapatlah disimpulkan bahwa pengamatan dalam penyaluran dana BOS sudah

menunjukkan baik. Adanya tanggapan responden yang memberikan tanggapan kurang baik disebabkan dalam proses penyaluran belum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2. Penilaian

Tabel 2
Tanggapan responden tentang pelaksanaan penilaian penyaluran dana BOS

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
1.	Sangat Baik	4	28,5
2.	Baik	7	50,0
3.	Kurang Baik	2	14,3
4.	Tidak Baik	1	7,2
Jumlah		14	100,00

Sumber : Hasil Olahan Data Primer Tahun 2015

Hasil penelitian dari hasil tanggapan responden diatas menunjukkan bahwa dari 14 responden yang memberikan tanggapan sangat baik berjumlah 6 atau 28,5 %. Selanjutnya yang memberikan tanggapan baik terhadap pengamatan dalam penyaluran dana BOS berjumlah 7 atau 50,0%. dan yang memberikan tanggapan kurang baik 2 atau 14,3 % serta 1 atau 7,2 % responden

memberikan tanggapan tidak baik. Melihat keseluruhan hasil tanggapan responden diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penilaian penyaluran dana BOS secara keseluruhan sudah menunjukkan baik karena penyaluran telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk atau pedoman yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi

Tabel 3
Tanggapan responden tentang evaluasi pelaksanaan penilaian penyaluran dana BOS

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
1.	Sangat Baik	2	14,2
2.	Baik	7	50,0
3.	Kurang Baik	5	35,8
4.	Tidak Baik	-	-
Jumlah		14	100

Sumber : Hasil Olahan Data Primer Tahun 2015

Hasil penelitian dari hasil tanggapan responden diatas menunjukkan bahwa dari 14 responden yang memberikan tanggapan sangat baik berjumlah 2 atau 14,2 % Selanjutnya Yang memberikan tanggapan

baik terhadap pengamatan dalam penyaluran dana BOS berjumlah 7 atau 50,0 % dan yang memberikan tanggapan kurang baik 5 atau 35,8 % , dan memberikan tanggapan tidak baik tidak ada. Dari hasil tanggapan

responden seperti dipaparkan diatas maka secara keseluruhan evaluasi penyaluran dana BOS telah dilaksanakan dengan baik. Namun dari tanggapan untuk responden tersebut masih ada respon yang memberikan tanggapan kurang baik yang persentase cukup besar. Hal ini disebabkan bahwa penilaian dalam penyaluran dana BOS belum dilaksanakan secara menyeluruh.

Faktor -faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap efektifitas penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah di SMK Rahmani Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara ada 3 yaitu :

1. Lembaga Pengawas

Pengawasan yang dimaksud disini adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga di luar pengelola program. Pengawasan terhadap pelaksanaan program BOS dilakukan oleh lembaga pengawasan yang berkompeten antara lain BPK, BPKP, Inspektorat Jendral, serta Bawasda Propinsi dan Kabupaten /Kota. Lembaga tersebut yang bertanggung jawab untuk melakukan audit terhadap kinerja dan administrasi keuangan. Selain itu dalam rangka transparansi pengelolaan dana BOS program ini dapat dimonitor oleh unsur Masyarakat. Unit pengaduan masyarakat terdapat di sekolah masing-masing. Kabupaten /Kota Propinsi dan Pusat. Lembaga tersebut dapat monitoring dalam rangka memotret pelaksanaan program BOS di sekolah namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOS diharapkan agar segera dilaporkan kepada lembaga berwenang.

2. Sosialisasi Pedoman

Untuk mendapatkan pelaksanaan hasil yang maksimal dalam menyelesaikan pekerjaan khususnya dalam pemberian dan penggunaan dana BOS maka pedoman atau petunjuk pelaksanaan yang digunakan

sebagai acuan perlu disosialisasikan untuk diketahui oleh para pegawai secara keseluruhan dan bukan memberikan batasan khusus pada pegawai pada yang berkecimpung pada dana BOS

3. Disiplin

Disiplin adalah merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati oleh setiap karyawan sebagai PNS maupun Swasta, dan menjau segala bentuk yang dilanggar atau tidak boleh dilanggar. Disiplin merupakan suatu sikap yang mencerminkan ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan sedangkan disiplin kerja merupakan ketaatan, ketekunan sikap hormat yang tampak sesuatu dengan aturan yang telah disepakati dalam suatu organisasi.

KESIMPULAN

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyaluran dana BOS di SMK Rahmani Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara bahwa dari indikator yang telah ditetapkan pada dasarnya pelaksanaan fungsi pengawasan telah menunjukkan hasil yang baik tetapi indikator tentang ketepatan waktu dan tepat sasaran masih menunjukkan hasil yang kurang baik.
2. Faktor yang mempengaruhi terhadap fungsi pengawasan terhadap penyaluran dana BOS di SMK Rahmani Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara antara lain lembaga pengawas, sosialisasi pedoman dan disiplin.

SARAN

Berdasarkan Kesimpulan yang dikemukakan diatas diajukan saran sebagai berikut :

1. Untuk memaksimalkan pengawasan hendaknya pengawasan terhadap penyaluran dana BOS dilaksanakan secara kontinyu, hal ini dimaksudkan

untuk memaksimalkan ketepatan sasaran dan penggunaan dalam penggunaan dana BOS.

2. Dalam upaya meningkatkan pengawasan dalam penyaluran dana BOS hendaknya koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali Utara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Admosudirjo, S. Prayudi, *Administrasi dan Manajemen*. Ghalia Indonesia Jakarta.2002
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Manajemen Penelitian, Edisi Baru*, PT.Rineka Cipta, Jakarta
- Barry Cushway, *Human Resource Management, Perencanaan, Analisis, Kinerja, Penghargaan*. Elek Media Komputondo. Jakarta.2001
- Handayaniingrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. BPFE.Yogyakarta.2002
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta. 2001
- J. Wayong dan Achmad Ichsan, *Fungsi Administrasi Negara*. Djambatan. Jakarta.2009
- Manullang, Tatang M *Dasar-dasar manajemen*. Ghalia Indonesia. Jakarta.2007
- Musanaf, *Manajemen Kepemimpinan Organisasi*. Gunung Agung. Jakarta.2004
- Riduwan, 2005. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Alfabeta, Jakarta
- Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Ghalia. Indonesia Jakarta.2001
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.2004

- Soekarno. K, *Dasar-dasar Manajemen*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2007
- Susilo Martoyo, *Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan*. BPFE Yogyakarta. 2008
- Suyadi Prawirosentoso, *Kebijakan Kinerja Karyawan*. BPFE Yogyakarta.2006
- The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*, Nurcahaya. Jakarta 2009.
- Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Rineka Cipta. Jakarta.1993

B. Dokumen

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Departemen Pendidikan Nasional 2011 *Panduan Bantuan Operasional Sekolah Jakarta*.